

BAB I

PENDAHULUAN

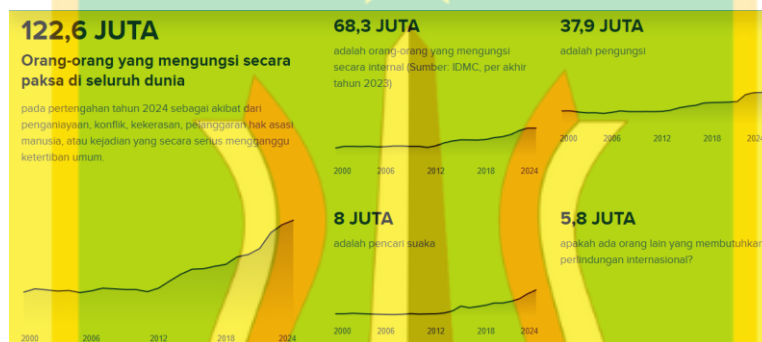
1.1 Latar Belakang Masalah

Libya merupakan negara yang terletak di kawasan Afrika Utara, berbatasan langsung dengan Laut Mediterania di utara, Mesir di timur, Sudan dan Chad di tenggara, Niger di selatan, serta Aljazair dan Tunisia di barat. Dengan luas wilayah sekitar 1,8 juta km², Libya menjadi salah satu negara terbesar di Afrika dan memiliki peran strategis dalam geopolitik kawasan.

Secara budaya, Libya merupakan bagian dari dunia Arab, dengan mayoritas penduduknya berbahasa Arab dan menganut agama Islam Sunni. Meskipun memiliki pengaruh budaya Berber, khususnya di wilayah barat dan selatan, identitas nasional Libya lebih didominasi oleh budaya Arab-Islam. Selain itu, dalam hal demografi, warna kulit masyarakat Libya bervariasi dari terang hingga gelap, mencerminkan perpaduan etnis Arab, Berber, dan Afrika Sub-Sahara. Keberadaan komunitas imigran dari negara-negara Afrika Sub-Sahara juga turut berkontribusi terhadap dinamika sosial dan ekonomi di Libya.

Libya menjadi titik transit utama bagi para migran dan pengungsi yang ingin mencapai Eropa karena beberapa faktor. Setelah pemberontakan yang didukung NATO pada tahun 2011 yang menggulingkan Muammar Gaddafi, Libya yang dilanda perang menjadi titik transit utama bagi para migran yang melarikan diri dari perang, kemiskinan, dan kondisi kehidupan yang buruk di Afrika dan Timur Tengah. Negara ini relatif dekat dengan pantai Yunani dan Italia, sehingga menjadi wilayah yang populer bagi para migran. Para migran ini berusaha untuk menyeberang ke Eropa melalui Libya dengan bantuan penyelundup, seringkali menggunakan perahu karet untuk melakukan perjalanan berbahaya melintasi Laut Tengah. Namun, banyak yang dicegat oleh penjaga pantai Libya dan dikirim ke pusat-pusat penahanan yang terkenal buruk di negara tersebut. Organisasi HAM mengecam kebijakan tersebut karena membuat para migran bergantung pada kelompok-kelompok bersenjata atau terkurung di pusat-pusat penahanan yang tidak layak. Libya juga menjadi pusat perhatian global terkait krisis keamanan di kawasan Afrika Utara dan Mediterania. Ketidakmampuan pemerintah

pusat Libya yang lemah untuk mengontrol wilayah negara tersebut telah menciptakan ruang bagi kelompok ekstremis, termasuk ISIS dan Al-Qaeda, untuk beroperasi. Beberapa laporan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini juga terlibat dalam perdagangan manusia sebagai salah satu sumber pendanaan mereka. Dengan demikian, masalah perdagangan manusia di Libya tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga memiliki dimensi keamanan internasional yang signifikan. Setelah jatuhnya Muammar Gaddafi pada tahun 2011, Libya mengalami kekacauan yang menyebabkan peningkatan migrasi paksa dan perdagangan manusia. Negara itu menjadi titik transit utama bagi migran dari Afrika dan Timur Tengah yang ingin mencapai Eropa.

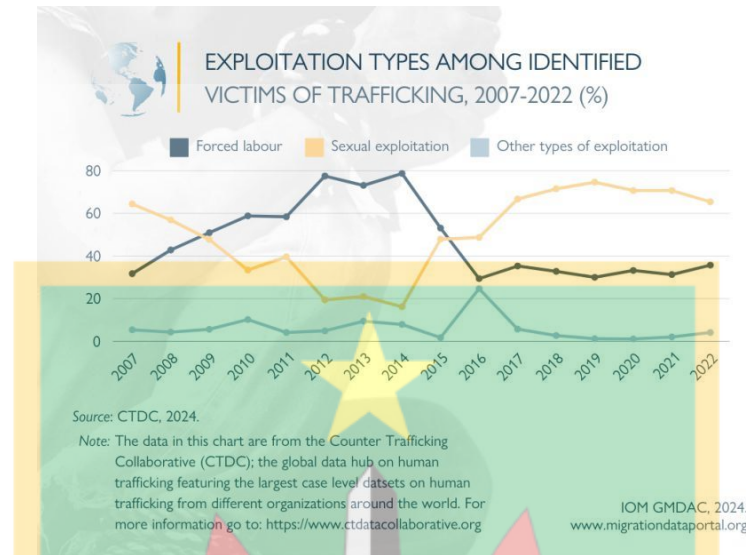


Gambar 1. 1 Jumlah orang mengungsi secara paksa di seluruh dunia

Sumber: UNHCR – The UN Refugee Agency

Basis data ini mencakup populasi pengungsi seperti pengungsi, pencari suaka, dan pengungsi internal, termasuk demografi mereka. Orang-orang tanpa kewarganegaraan juga disertakan, yang sebagian besar belum pernah mengungsi. Basis data ini juga mencerminkan berbagai jenis solusi untuk populasi pengungsi seperti pemulangan atau pemukiman kembali. Situs web ini didasarkan pada tiga sumber data. Data UNHCR dikumpulkan melalui kegiatan statistik tahunannya dengan beberapa data yang diambil sejak tahun 1951, tahun UNHCR didirikan. Data disediakan oleh Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA). Informasi terbatas pada pengungsi Palestina yang terdaftar berdasarkan mandat UNRWA. Data yang disediakan oleh Pusat Pemantauan Pengungsi Internal (IDMC) Informasi terbatas

pada orang-orang yang mengungsi di negara asal mereka karena konflik atau kekerasan.



Gambar 1. 2 Jenis eksploitasi korban perdagangan manusia

Sumber: data from Countering Trafficking Collaborative (CTDC)

Di antara korban perdagangan manusia yang teridentifikasi antara tahun 2002 dan 2022, persentase tertinggi adalah warga negara berikut: Ukraina (16%), Filipina (11%), Amerika Serikat (10%), Republik Moldova (9%) dan Meksiko (7%). Karena data ini mencerminkan jumlah korban yang teridentifikasi oleh organisasi yang berkontribusi, persentase ini mungkin tidak mewakili semua korban yang teridentifikasi di suatu negara atau secara global. Untuk melindungi privasi individu, beberapa negara kewarganegaraan juga ditekan karena sangat sensitif dan tidak dapat dilindungi.

Peningkatan perdagangan manusia di Libya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Ketidakstabilan dan konflik yang berkepanjangan akibat perang saudara serta munculnya kelompok bersenjata telah menciptakan lingkungan yang penuh kekerasan dan ketidakpastian. Selain itu, ketiadaan pemerintahan yang kuat pasca-penggulingan Gaddafi menyebabkan Libya terpecah antara pemerintahan yang bersaing, membuka peluang bagi kelompok militan dan bersenjata untuk beroperasi secara bebas. Migrasi paksa akibat konflik juga memperburuk keadaan,

dengan jutaan orang yang terpaksa mengungsi atau hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap perdagangan manusia. Lebih lanjut, perbatasan Libya yang luas dan sulit diawasi, terutama di daerah gurun, mempersulit kontrol terhadap pergerakan orang dan barang, yang pada akhirnya memperbesar risiko penyelundupan serta perdagangan manusia. Selain itu, melimpahnya senjata dan amunisi pasca-perang 2011 memungkinkan aktor non-negara untuk bergerak dan beroperasi secara leluasa, semakin memperburuk situasi keamanan di kawasan Praktik perdagangan manusia termasuk penahanan dan penyiksaan migran. Pada Februari 2025, pihak berwenang Libya membebaskan 76 migran dari pusat perdagangan manusia dan menangkap tiga orang yang diduga menahan dan menyiksa para migran. Kuburan massal migran telah ditemukan di Libya, yang terbaru adalah penemuan hampir 50 mayat di dua kuburan massal di gurun tenggara Libya.

Kelompok bersenjata, milisi, dan jaringan kriminal transnasional terlibat dalam perdagangan manusia melalui berbagai modus operandi yang canggih. Mereka merekrut korban dengan cara tipu daya, pemaksaan, atau penculikan, sering kali dengan janji palsu tentang pekerjaan di luar negeri. Untuk memfasilitasi perpindahan korban melintasi perbatasan, mereka memanfaatkan celah dalam sistem keamanan dan imigrasi serta menggunakan teknologi informasi dan media sosial guna merekrut korban secara daring dan menyamarkan jejak kejahatan. Jaringan kriminal ini juga mengeksploitasi kerentanan korban, seperti kondisi ekonomi yang sulit, ketidakmampuan berbahasa asing, serta kurangnya pemahaman terhadap hak-hak mereka. Dengan menggunakan ancaman, kekerasan fisik, dan pemerasan, para pelaku memaksa korban bekerja dalam kondisi eksploitatif tanpa bayaran. Selain itu, mereka sering berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pejabat korup, agen perjalanan ilegal, dan pengusaha tidak bermoral, untuk mempermudah praktik perdagangan manusia. Organisasi kriminal ini memiliki struktur hierarkis yang terorganisir dengan baik, menggunakan komunikasi terenkripsi, serta identitas palsu untuk mengoordinasikan operasi mereka dan menyembunyikan jejak kejahatan, sehingga semakin sulit bagi aparat penegak hukum untuk melacak dan membongkar jaringan mereka. Konflik internal yang terjadi sejak peristiwa Arab Spring dan kematian Muammar Ghaddafi telah

menyebabkan ketidakstabilan politik dan keamanan di Libya. Situasi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan manusia. Beberapa sumber penghasilan masyarakat Libya bahkan berasal dari perdagangan manusia, terutama di daerah-daerah yang tidak terlalu diperhatikan. Komisi Uni Afrika menyatakan keprihatinannya atas pendanaan kegiatan teroris, termasuk hubungan antara terorisme dan kejahatan terorganisasi transnasional seperti perdagangan narkoba dan eksploitasi sumber daya alam ilegal. AU juga memiliki kampanye untuk melawan perdagangan manusia protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Human trafficking, especially Women and Children), melengkapi Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional atau UN Convention against Transnational Organised Crime (Palermo Protocol) yang diadopsi pada tahun 2000. Protokol ini membedakan perdagangan manusia dari penyelundupan manusia melalui unsur-unsur eksploitasi, penipuan dan pemaksaan. Protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Human trafficking, especially Women and Children), melengkapi Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional atau UN Convention against Transnational Organised Crime (Palermo Protocol) yang diadopsi pada tahun 2000. Protokol ini membedakan perdagangan manusia dari penyelundupan manusia melalui unsur-unsur eksploitasi, penipuan dan pemaksaan.

1.2 Pokok Masalah

Dinamika kompleks di Libya pasca jatuhnya rezim Gaddafi menciptakan kekosongan pemerintahan, ketidakstabilan politik, serta meningkatnya kekuatan milisi bersenjata. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengontrol wilayahnya dan menanggulangi jaringan kriminal menjadikan Libya sebagai pusat perdagangan manusia, yang menghubungkan negara-negara Afrika dengan Eropa melalui Laut Mediterania. Jaringan perdagangan manusia ini memperburuk krisis migrasi, meningkatkan ancaman terhadap keamanan di kawasan Mediterania, dan menimbulkan tekanan diplomatik pada negara-negara Eropa untuk menangani

gelombang migran dan pengungsi. Secara internasional, perdagangan manusia di Libya juga menjadi sumber pendanaan bagi kelompok militan dan teroris yang beroperasi di Afrika Utara, memperburuk ketidakstabilan keamanan regional yang sudah rapuh. Dengan demikian, dampak perdagangan manusia di Libya tidak hanya berfokus pada masalah kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan tantangan besar terhadap keamanan nasional dan internasional, memerlukan campur tangan dari berbagai aktor global. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hubungan antara perdagangan manusia dan ketidakstabilan yang meluas, serta menganalisis dampak global fenomena ini terhadap keamanan dan kebijakan luar negeri berbagai negara.

Pendekatan komprehensif yang mencakup dimensi kemanusiaan, keamanan, dan pembangunan. Bantuan keuangan dan teknis diberikan kepada organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR untuk menyediakan perlindungan bagi migran. Uni Eropa juga menjalin kerja sama dengan negara-negara Afrika Utara dalam memperkuat pengawasan perbatasan, mencegah penyelundupan manusia, serta meluncurkan operasi maritim seperti Operasi Irini. Selain itu, upaya stabilisasi politik dan dukungan institusional di Libya turut menjadi bagian dari strategi Uni Eropa dalam menekan perdagangan manusia.

Instabilitas politik di Libya terus mendorong lonjakan kasus perdagangan manusia, dengan banyak migran menjadi korban eksploitasi, penyiksaan, dan pemerasan. Negara-negara Afrika Utara merespons dengan memperketat kontrol perbatasan dan meningkatkan patroli maritim, meskipun efektivitas langkah ini masih terbatas akibat lemahnya koordinasi dan kapasitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lebih komprehensif yang menargetkan akar penyebab perdagangan manusia, seperti kemiskinan dan ketidakstabilan politik, serta memastikan perlindungan yang lebih baik bagi para korban.

Berdasarkan dari hal tersebut, rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak signifikan perdagangan manusia di Libya di kawasan Afrika Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Dinamika Perdagangan Manusia di Libya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktor-aktor kunci yang terlibat dan

mengevaluasi respons kebijakan, baik dari pemerintah lokal maupun komunitas internasional, dalam menangani masalah perdagangan manusia di Libya.

2. Mengeksplorasi dampaknya terhadap Stabilitas Keamanan Regional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak perdagangan manusia terhadap stabilitas keamanan regional, dengan fokus pada bagaimana aktivitas ini memicu konflik, memperkuat jaringan kriminal, dan meningkatkan ketidakstabilan politik di kawasan tersebut. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana perdagangan manusia di Libya memengaruhi keamanan negara-negara tetangga, aliran migrasi, dan merusak upaya kerja sama keamanan di kawasan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor penyebab dan pola perdagangan manusia di kawasan tersebut. Selain itu, studi ini dapat membantu peneliti yang ingin meneliti mengenai tema judul skripsi ini.

1.3 Sistematika Penulisan

Untuk membuat pembahasan penelitian ini lebih mudah dipahami oleh penulis dan pembaca, penulis akan memberikan penjelasan yang sistematis mengenai materi penelitian. Secara sistematis, skripsi ini disusun menjadi enam bab, masing-masing dengan fokus yang berbeda, tetapi saling mendukung dan melengkapi.

1. BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan garis besar konsep umum yang dimasukkan ke dalam konteks yang ringkas dan jelas. Oleh karena itu, uraian tulisan dimulai dengan latar belakang masalah, termasuk alasan pemilihan judul dan urgensi pembahasan topik tersebut. Setelah itu, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan, keuntungan dan sistematika penelitian dibahas.

2. BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Merupakan tinjauan pustaka atau literatur review, berisi landasan teori yang mencakup penjelasan tentang teori keamanan manusia dan konsep perdagangan manusia yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, termasuk artikel-artikel dalam jurnal yang digunakan penulis sebagai

bahan referensi dalam penelitian mereka, serta perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini

3. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini merupakan pengumpulan data melalui berbagai sumber media, serta mencakup teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan aspek, dimensi, dan parameter

4. BAB IV: HASIL

Pada bab ini, penulis memaparkan hasil yang mencakup mengenai penelitian, serta data yang diperoleh terkait implikasi perdagangan manusia di Libya terhadap stabilitas keamanan dan kerjasama di kawasan Kawasan Afrika Utara pada periode 2019-2023

5. BAB V: PEMBAHASAN

Bab ini akan menganalisis hasil yang telah dipaparkan pada Bab 4. Pembahasan akan dilakukan dengan mengaitkan hasil penelitian dengan teori keamanan manusia serta konsep perdagangan manusia, kondisi hubungan perdagangan manusia, serta dampak yang ditimbulkan terhadap stabilitas keamanan dan kerja sama di kawasan Afrika Utara

6. BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi Kesimpulan dari hasil analisis yang sudah dilakukan dan saran-saran bagi pemerintah. Kesimpulan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang di ajukan di bab pendahuluan.